

## PERAN MASYARAKAT MIGRAN DAN STAKEHOLDER TERHADAP PEMBANGUNAN DI DAERAH ASAL

**Didit Purnomo**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: [dp274@ums.ac.id](mailto:dp274@ums.ac.id)

### ABSTRACT

Tujuan penelitian ini menganalisis bentuk partisipasi para migran (tenaga kerja) yang bekerja ke luar daerah terhadap pembangunan di daerah asalnya. Hasil yang diinginkan adalah untuk mengetahui tingkat partisipatif para migrant terhadap pembangunan pertanian di daerah asalnya, sehingga aktifitas bekerja ke luar daerah yang mereka lakukan tidak terkesan negative, namun justru dapat memberikan contoh positif bagi para calon tenaga kerja yang ingin meneruskan tradisi bekerja di luar daerahnya. Selain itu untuk mengetahui peran stakeholder yang terkait, Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan survey pada pelaku dan keluarga migran di daerah asal. Pengkajian dalam penelitian ini menggunakan tahapan dan teknik survey lapangan dengan didukung analisis kuantitatif AHP (analytical hirarhy processes) dan analisis kualitatif untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi stakeholder terhadap pembangunan pertanian cukup berperan, terutama peran tokoh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat tersebut sangat berpengaruh terhadap kelembagaan tani yang menjunjang keberlangsungan pembangunan pertanian di daerah asal. Tentunya, peran positif masyarakat migran dan stakeholder seperti ini harus didukung pemerintah daerah sehingga proses pembangunan pertanian di daerah asal dapat berhasil maksimal.

**Kata kunci:** partisipasi migran, stakeholder, pembangunan pertanian, model partisipatif, analisis hirarki

### 1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa terus bergerak, melewati batas sosial maupun kewilayahan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam upaya menuju kesejahteraan (Tirtosudarmo, 2009). Pada konsep demografi, mobilitas mengacu pada perpindahan penduduk secara kewilayahan, fisik maupun geografi. Berbeda dengan konsep sosiologi dimana mobilitas dilihat dari sudut pandang perubahan status, misalnya pekerjaan. Para demografer menggunakan istilah yang lebih dikenal yakni migrasi yang didefinisikan sebagai mobilitas melewati batas wilayah administrasi maupun politik, misalnya negara, kota atau kabupaten. Pembangunan yang tidak merata, terutama antara desa-kota, mendorong terjadinya perpindahan penduduk melewati batas kewilayahan dari desa ke kota baik karena alasan pendidikan, pekerjaan maupun

perkawinan. Pergerakan penduduk ini ada yang semula karena pindah sementara di tempat tujuan untuk beberapa hari, tetapi terus menetap. Bahkan hanya sementara saja yaitu gerakan harian, mingguan, bulanan dan tahunan, kemudian kembali ke tempat asal (migrasi sirkuler).

Migrasi sirkuler atau lebih dikenal dengan istilah 'boro' (Jawa) dapat diartikan sebagai orang yang merantau untuk keperluan tertentu (biasanya untuk tujuan bekerja) (Purnomo, 2009). Tujuan orang 'boro' sangat bervariasi yaitu antar kota, antar propinsi, antar pulau, bahkan ke luar negeri. Namun, biasanya sebutan tersebut ditujukan pada orang yang merantau dalam jangka waktu tertentu (bukan permanen). Aktivitas ini merupakan bagian dari fenomena migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/ negara ataupun batas administratif/ batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Ada dua dimensi penting yang perlu ditinjau dalam penelaahan migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi tempat tinggal (Munir, 2011). Fenomena tersebut sangat semarak di Indonesia. Salah satu daerah yang mencerminkan adanya fenomena migrasi antar daerah (*interprovincial migration*) diperlihatkan oleh tenaga kerja asal Wonogiri.

Fenomena migrasi yang berlangsung dalam suatu negara (*internal migration*) banyak terlihat di berbagai wilayah Indonesia, dan salah satu daerah yang mencerminkan adanya fenomena migrasi antar daerah (*interprovincial migration*) diperlihatkan oleh tenaga kerja asal Wonogiri. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai banyak tenaga kerja yang melakukan mobilitas (*boro*) ke luar daerah. Lebih kurang 110 ribu penduduk Kabupaten Wonogiri (dari masing-masing kecamatan) yang melakukan aktivitas tersebut (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Wonogiri dalam angka tahun 2006). Aktivitas *mboro* mereka sudah dilakukan secara turun temurun, yaitu sudah berlangsung beberapa generasi. Keputusan logis mereka memang tidak bisa dicegah. Namun, apabila kondisi ini dibiarkan maka akan terjadi semacam transfer tenaga kerja dari desa ke kota. Secara tidak langsung keadaan tersebut dapat menyebabkan turunnya produktivitas lahan pertanian, terutama bagi daerah yang mempunyai potensi pertanian. Seterusnya apabila produktivitas lahan turun, hal ini dapat memicu turunnya (tidak majunya) sektor pertanian.

Turunnya produktivitas lahan pertanian memang tidak hanya dipengaruhi oleh kekurangan tenaga kerja yang mengolah lahan pertanian (karena banyak tenaga kerja yang pergi meninggalkan daerah asalnya). Kurangnya partisipasi masyarakat terkait dengan potensi lahan pertanian, juga termasuk penyebab turunnya atau berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Kondisi semacam ini bila dibiarkan berlarut, akan mengganggu produksi pertanian di pedesaan. Sehingga muncul permasalahan, bagaimana nasib pembangunan pertanian ke depan, bila semua tenaga kerja produktifnya justru

meninggalkan daerahnya? Kendala seperti ini sebenarnya dapat diatasi dengan peran aktif para migran itu sendiri, yaitu dengan menggali potensi dan mengolahnya menjadi sebuah kekuatan mandiri yang dapat diarahkan pada peningkatan pembangunan daerah asal, terutama di sektor pertanian.

Dalam konteks penelitian ini, 'lemahnya' program partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan lahan secara maksimal, akan menjadi perhatian dan kajian pembahasan. Program partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah pemberdayaan terhadap masyarakat di daerah asal.

Penelitian yang kami ajukan dalam hibah bersaing ini, dimaksudkan untuk menganalisis dan merumuskan bagaimana bentuk partisipatif para migran sehingga selain mereka bekerja di luar daerahnya, namun juga dapat diandalkan tingkat partisipasinya dalam memajukan pembangunan pertanian di daerah asalnya.

Oishi (2002) menjelaskan bahwa di negara-negara pengirim migran, informasi tentang pekerjaan dan standar hidup di luar negeri secara efisien disampaikan melalui jaringan personal seperti teman dan tetangga yang telah beremigrasi. Sedangkan di negara-negara penerima (negara tujuan), masyarakat migran sering membantu laki-laki dan wanita seusianya (*sejawat*) untuk beremigrasi, mendapatkan suatu pekerjaan, dan menyesuaikan dengan suatu lingkungan baru. Jaringan yang demikian ini mengurangi biaya-biaya migrasi bagi para pendatang baru, yang menyebabkan para migran yang potensial untuk meninggalkan negara (daerah) mereka.

Menurut Bunea (2012), dalam ekonomi migrasi, pertimbangan faktor umum penentu dalam migrasi internal adalah Usia: orang muda bermigrasi lebih karena mereka memiliki waktu yang lebih lama di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari investasi melakukan migrasi jika kembali kedaerahnya. Pendidikan: orang berpendidikan tinggi sangat ingin untuk bermigrasi karena mereka lebih efisien dalam

mencari peluang kerja di berbagai pasar tenaga kerja, sehingga mengurangi biaya migrasi. Jarak: semakin lama jarak tempuh migrasi semakin rendah insentif untuk bermigrasi karena biaya migrasi yang lebih besar. Faktor lain, seperti: pengangguran-pengangguran lebih cenderung akan bermigrasi, menderita masalah endogenitas, perbedaan upah -dampak positif potensial sensitif terhadap masalah penyimpangan seleksi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonogiri (beberapa sampel kecamatan). Pemilihan daerah penelitian ini berdasar pada justifikasi daerah potensi pertanian dan mayoritas penduduknya 'boro' (mengacu hasil observasi dan data di dinas kependudukan dan catatan sipil, serta dinas pertanian).

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara *indepth interview* dengan responden (para tenaga kerja/calon, tokoh masyarakat/*key-persons* dan institusi yang terkait). Sedangkan data sekunder berupa data tentang ketenagakerjaan, jumlah orang boro dari dinas terkait, dan kumpulan data statistik terkait informasi sektor pertanian.

Metode persampelan yang digunakan untuk memilih responden dalam penelitian adalah dengan metode tahapan berganda (*multi-stage sampling*) yakni dengan *cluster* dan *stratified sampling*. *Cluster* yang dipergunakan adalah dari sebaran geografis dari asal daerah responden (kecamatan). Sedangkan unsur *stratified*-nya adalah didasarkan atas kelompok responden (TK, calon TK, *key-persons*). Responden dalam penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut: (1) migran, yaitu migrant atau keluarga migrant; (2) *key-persons* dari tokoh setempat di masing-masing daerah penelitian; dan (3) *key-persons* dari instansi terkait.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rapid rural appraisal*, wawancara mendalam, observasi partisipatif (*participative observation*), dan dokumentasi.

Analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis kuantitatif:

Yaitu analisis persepsi responden (Susilowati, 2002) dan hirarki proses sebagaimana penelitian Sudantoko (2010) dengan modifikasi seperlunya. Masing-masing aspek diperlukan komponen-komponen yang menjadi materi kajian. Komponen tersebut merupakan data yang diambil dari semua pihak (stakeholder terkait), dikaji, didiskusikan dalam forum, kemudian dianalisis. Sebelum disimpulkan hasil analisis perlu mendapat justifikasi dari beberapa pihak/institusi terkait. Analisis persepsi responden ini adalah suatu kajian fenomena berdasarkan dari pendapat atau persepsi responden sebagai pelakunya. Persepsi responden diperlukan dalam mendukung jawaban yang diberikan oleh responden dalam memberikan jawaban sesuai realita yang dialami atau fenomena yang berlaku. Untuk mengidentifikasi profil sosial-ekonomi responden dan untuk dapat menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh migrant dan keluarga migran di daerah asal akan dipergunakan alat analisis statistika deskriptif dan analisis mendalam (*indepth analysis*).

2. Analisis kualitatif

Dari hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan para responden (target) maka dapat digali informasi tentang profil atau karakter dari responden secara lebih mendalam dan lebih spesifik. Analisis kualitatif ini banyak direkomendasikan oleh para antropolog atau sosiolog untuk menggali lebih mendalam tentang karakter seseorang terhadap nilai-nilai tertentu yang akan dicari.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Stakeholder dan Peran Kelembagaan di Daerah Kantong Migran

Penelitian ini kelanjutan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan tingkat partisipasi stakeholder terhadap pembangunan pertanian cukup berperan, terutama peran tokoh masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian awal tersebut, kegiatan penelitian ini adalah menganalisis peran aktif stakeholder dan komponen

kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian. Peran aktif stakeholder yang diteliti dalam penelitian ini adalah Academic, Bussines, Government, dan Community.

Sebagaimana hasil FGD, diketahui masing-masing peran stakeholder dalam mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, Pemerintah melalui dinas pertanian mempunyai peran dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani. Upaya lembaga Dinas Pertanian melalui kegiatan petugas PPL dilapangan dalam rangka memanfaatkan lahan diantaranya adalah memberikan penyuluhan mengenai teknik bertanam yang dapat menghasilkan produksi pertanian secara maksimal. Penyuluhan yang disampaikan kepada PPL di atas, merupakan upaya Dinas Pertanian dalam pemanfaatan lahan melalui pemberdayaan kelembagaan. Pemberdayaan kelembagaan yang dilakukan dinas pertanian adalah melalui kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Di satu sisi, Dinas ketahanan pangan juga melakukan pemberdayaan kelembagaan melalui lembaga LPMD, untuk membantu kesulitan yang dihadapi petani pra tanam hingga pasca panen. Dinas Pertanian menjadi tumpuan harapan dalam menyediakan infrastruktur. Dalam rangka pemberdayaan, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri

kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor. Selanjutnya program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota. Perubahan harga memerlukan peran pemerintah untuk menetapkan kebijakan harga dalam bentuk insentif harga dengan menempatkan pemerintah sebagai "Tengkulak". Secara teoritis, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi keputusan petani menjual hasil pertanian kepada para tengkulak. Partisipasi aktif pemerintah sebagai agen "Tengkulak" dapat diimplementasikan melalui lembaga-lembaga petani yang sudah ada (Gapoktan, LPMD, dan LDPM). Bahkan pemerintah (melalui instansi terkait), dapat menjadi mediator pengelolaan hasil produksi pertanian

oleh lembaga petani yang ada menjadi BUMD. Sebagaimana dikemukakan pihak pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri, bahwa Lembaga petani yang ada diantaranya Gapoktan, LPMD, LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), Kelompok Tani, Pemerintahan Desa, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Masing-masing lembaga tersebut dibentuk untuk membantu petani meningkatkan hasil produksi, mulai dari bantuan modal petani, penyuluhan-penyuluhan, dan perlindungan pasca panen. Hal ini didukung dengan keterangan bapak Kukuh salah satu petugas PPL Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri yang menyatakan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dibawah Kementerian Pertanian. Dinas Pertanian membantu petani dalam hal teknis sedangkan Dinas Ketahanan Pangan membantu petani untuk mencapai ketahanan pangan. Sehingga dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga petani yang ada dengan lembaga lain saling berkaitan, baik lembaga di bawah binaan Dinas Pertanian maupun di bawah binaan Dinas Ketahanan Pangan, dan semuanya untuk kesejahteraan petani. Serangan hama yang dialami petani merupakan bagian dari tugas Dinas Pertanian untuk membantu menyelesaikan. Dinas Pertanian dapat memberikan masukan-masukan kepada petani dalam penanggulangan hama melalui lembaga petani yang ada. Departemen Petani bahkan dapat membagikan cara menekan adanya serangan hama mulai dari awal proses produksi. Petani diberikan cara pengolahan awal dengan pemberian pupuk cair organik melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan. Peran stakeholder dalam mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian meliputi aspek-aspek berikut:

1. Memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pelatihan
2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan infrastruktur
3. Memiliki kuasa untuk regulasi distribusi hasil pertanian
4. Memiliki kuasa untuk menentukan harga
5. Memiliki kemampuan untuk memberikan subsidi produksi pertanian

6. Memiliki kemampuan dalam penanggulangan hama
7. Memberikan perlindungan dalam proses produksi pertanian
8. Memiliki kemampuan dalam sumbangsih inovasi teknologi/ penyediaan alat – alat
9. Mempunyai kemampuan untuk berproduksi
10. Memiliki kemampuan dalam mencari tambahan modal
11. Memiliki kemampuan untuk mengadakan interaksi antar petani/kerjasama
12. Memiliki kemampuan networking dengan pihak pengembang
13. Memiliki kemampuan dalam kelembagaan
14. Memiliki kemampuan dalam penambahan lahan
15. Memiliki kemampuan untuk konsultasi pertanian
16. Memiliki kemampuan dalam pemberian motifasi
17. Memiliki kemampuan untuk konsultasi pertanian

Aspek-aspek Peran stakeholder dalam mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, diuji menggunakan AHP untuk memperoleh konsistensinya dalam keberlangsungan pembangunan pertanian. Berdasarkan perhitungan data kasar awal penelitian, berikut uraian hasil analisis peran stakeholder komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian.

#### 1. Peran aktif *Academic* dan komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian

Peran aktif *Academic* berikut komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, rata-rata terendah 0.15 dan tertinggi 2,90. Berikut rata-rata penilaian Peran aktif *Academic* berikut komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian.

Komponen Partisipasi Kelembagaan Akademisi	Rata-rata
--	-----------

Mempunyai kemampuan untuk membuat penyuluhan	0.20
Memiliki kemampuan dalam optimalisasi lahan	0.35
Memiliki kemampuan untuk melakukan pelatihan	0.80
Memiliki kemampuan dalam pemberian motifasi	0.15
Memiliki kemampuan untuk konsultasi pertanian	0.40
Memiliki kemampuan dalam sumbangsih inovasi teknologi	2.90

Komponen peran aktif akademisi sebagaimana penilaian anggota kelompok tani, bahwa akademisi mempunyai kemampuan untuk membuat penyuluhan rata-rata 0.20; akademisi memiliki kemampuan dalam optimalisasi lahan rata-rata 0.35; akademisi memiliki kemampuan untuk melakukan pelatihan rata-rata 0.80; akademisi memiliki kemampuan dalam pemberian motifasi rata-rata 0.15; akademisi memiliki kemampuan untuk konsultasi pertanian rata-rata 0.40 ; dan akademisi memiliki kemampuan dalam sumbangsih inovasi teknologi rata-rata 2.90.

## 2. Peran aktif *Businnes* dan komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian

Peran aktif *Businnes* dan komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, diketahui paling kecil 0,50 dan tertinggi 1,50. Komponen kelembagaan yang mendukung tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Partisipasi Komponen Kelembagaan	Rata-rata
Mempunyai kemampuan dalam penanaman modal	1.50
Memiliki kemampuan mengadakan pelatihan	0.85
Memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama	0.50
Memiliki kemampuan dalam pendistribusian hasil pertanian	1.50
Memiliki kemampuan dalam penyediaan alat – alat	0.60

Memiliki kemampuan dalam sumbangsih inovasi teknologi	0.55
---	------

Komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian oleh *Businnes* menurut petani, bahwa *Businnes* mempunyai kemampuan dalam penanaman modal sebesar 1.50, diikuti kemampuan dalam pendistribusian hasil pertanian sebesar 1.50, kemampuan mengadakan pelatihan sebesar 0.85, kemampuan dalam penyediaan alat – alat sebesar 0.60, memiliki kemampuan dalam sumbangsih inovasi teknologi sebesar 0.55, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama sebesar 0.50.

## 3. Peran aktif *Government* dan komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian

Keberlangsungan pembangunan pertanian, juga didukung peran aktif pemerintah. Komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian oleh pemerintah, tertinggi adalah memberikan perlindungan dalam proses produksi pertanian. Berikut hasil penelitian komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian oleh pemerintah selengkapnya.

Partisipasi Komponen Kelembagaan	Rata-rata
Memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pelatihan	2.30
Memiliki kemampuan untuk menyediakan infrastruktur	2.15
Memiliki kuasa untuk regulasi distribusi hasil pertanian	1.70
Memiliki kuasa untuk menentukan harga	0.45
Memiliki kemampuan untuk memberikan subsidi produksi pertanian	1.70
Memiliki kemampuan dalam penanggulangan hama	0.75
Memberikan perlindungan dalam proses produksi pertanian	2.40

Memiliki kemampuan dalam sumbangsih inovasi teknologi	1.35
---	------

Komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian oleh pemerintah, menurut petani, memberikan perlindungan dalam proses produksi pertanian sebesar 2.40, memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pelatihan sebesar 2.30, memiliki kemampuan untuk menyediakan infrastruktur sebesar 2.15, memiliki kuasa untuk regulasi distribusi hasil pertanian sebesar 1.70, memiliki kemampuan untuk memberikan subsidi produksi pertanian sebesar 1.70, memiliki kemampuan dalam sumbangsih inovasi teknologi sebesar 1.35, memiliki kemampuan dalam penanggulangan hama sebesar 0.75, dan memiliki kuasa untuk menentukan harga sebesar 0.45. Komponen yang paling menonjol menunjukkan peran aktif pemerintah memberikan perlindungan dalam proses produksi pertanian.

**4. Peran aktif *Community* dan komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian**

Petani sebagai pelaku sekaligus sasaran kelembagaan dalam keberlangsungan pembangunan pertanian, menjadi penggerak utama. Peran aktif *Community* dan komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana disajikan dalam table berikut.

Partisipasi Komponen Kelembagaan	Rata-rata
Mempunyai kemampuan untuk berproduksi	1.80
Memiliki kemampuan dalam mengembangkan proses produksi	1.80
Memiliki kemampuan dalam pendistribusian	1.30
Memiliki kemampuan dalam mencari tambahan modal	2.15
Memiliki kemampuan untuk mengadakan interaksi antar petani	0.70

Memiliki kemampuan networking dengan pihak pengembang	0.15
Memiliki kemampuan dalam kelembagaan	1.70
Memiliki kemampuan dalam penambahan lahan	1.80

Komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, dari peran aktif petani yang paling besar adalah bahwa petani memiliki kemampuan dalam mencari tambahan modal sebesar 2.15, mempunyai kemampuan untuk berproduksi sebesar 1.80, memiliki kemampuan dalam mengembangkan proses produksi sebesar 1.80, memiliki kemampuan dalam penambahan lahan sebesar 1.80, memiliki kemampuan dalam kelembagaan sebesar 1.70, memiliki kemampuan dalam pendistribusian 1.30, memiliki kemampuan untuk mengadakan interaksi antar petani sebesar 0.70, dan memiliki kemampuan networking dengan pihak pengembang sebesar 0.15.

**Model Partisipatif yang Sesuai dengan Karakter Migran Di Daerah terhadap Pembangunan Pertanian**

Pada uraian sebelumnya, ada 17 komponen Peran stakeholder dalam mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian. Ketujuhbelas komponen, belum memberikan dukungan secara optimal terhadap keberlangsungan pembangunan pertanian melalui kelembagaan. Komponen stakeholder yang digali dari responden, merupakan harapan yang dapat direalisasikan untuk penguatan kelembagaan petani di kantong migrant.

**PEMBAHASAN**

Peran aktif *Academic* berikut komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian tertinggi adalah Memiliki kemampuan dalam sumbangsih inovasi teknologi dan Memiliki

kemampuan untuk melakukan pelatihan. Peran aktif **Businnes** berikut komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian tertinggi adalah Mempunyai kemampuan dalam penanaman modal, dan Memiliki kemampuan dalam pendistribusian hasil pertanian. Komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian oleh pemerintah, tertinggi adalah memberikan perlindungan dalam proses produksi pertanian dan Memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pelatihan. Peran aktif *Community* dan komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, tertinggi adalah memiliki kemampuan dalam mencari tambahan modal dan mempunyai kemampuan untuk berproduksi.

Peran aktif *Academic*, **sumbangsih inovasi teknologi**, dalam mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, berupa kebaruan sarana pertanian yang dapat membantu proses produksi petani. Sumbangsih inovasi teknologi tersebut berupa alat-alat pertanian, variasi unggulan tanaman pertanian, dan inovasi pengembangan pupuk ataupun obat-obatan anti hama. Inovasi tersebut berasal dari uji laboratorium ataupun dari uji pengembangan alat pertanian yang sengaja dilakukan sebagai sumbangan terhadap petani. Peran aktif *Academic*, **kemampuan untuk melakukan pelatihan**, dalam mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, berupa praktik-praktik mengolah dan mengelola lahan pertanian. Akademisi menguasai teori semua ilmu pengetahuan, khususnya terkait pertanian, yang dapat dibagikan kepada petani tentang pengolahan dan pengelolaan lahan. Bahkan akademisi juga menguasai teori bagaimana petani harus menggunakan hasil pertanian sebagai sumber ekonomi keluarga.

Peran aktif **Businnes** dalam mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian pada kemampuan **penanaman modal**, adalah peran dalam mendukung petani dengan memberikan pinjaman untuk pengolahan dan pengelolaan lahan petani. *Business*, kegiatan utamanya adalah berdagang, maka dalam

**pendistribusian hasil pertanian**, merupakan komponen yang tidak sulit dilakukan business. Peran *business* dalam **pendistribusian hasil pertanian, sering dilakukan dengan praktik-praktik tengkulak**, membeli hasil pertanian dengan harga semurah-murahnya dan menjual dengan harga setinggi-tinggi. Artinya peran aktif business dalam pendistribusian hasil pertanian, perlu ada pengawasan dari pemerintah.

#### 4. SIMPULAN

Berdasar hasil penelitian, kesimpulan yang dikemukakan adalah keterlibatan para migrant (termasuk keluarga migrant) sangat berperan terhadap peningkatan pembangunan peretanian di daerah asalnya, terutama di sektor pertanian. Peran aktif *Academic* berikut komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian tertinggi adalah memiliki kemampuan dalam sumbangsih inovasi teknologi dan memiliki kemampuan untuk melakukan pelatihan. Peran aktif *Businnes* berikut komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian tertinggi adalah mempunyai kemampuan dalam penanaman modal, dan memiliki kemampuan dalam pendistribusian hasil pertanian. Komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian oleh pemerintah, tertinggi adalah memberikan perlindungan dalam proses produksi pertanian dan Memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pelatihan. Peran aktif *Community* dan komponen kelembagaan yang mendukung keberlangsungan pembangunan pertanian, tertinggi adalah memiliki kemampuan dalam mencari tambahan modal dan mempunyai kemampuan untuk berproduksi.

#### 5. REFERENSI

Bunea, Daniela, 2012, "Modern Gravity Models of Internal Migration.The Case of Romania" *Theoretical and Applied Economics* Volume XIX (2012), No. 4(569), pp. 127-144



- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Wonogiri dalam angka tahun 2006
- Munir, Rozy. 2011, "Migrasi", Ed. Sri Moertiningsih Adioetomo & Omas Bulan Samosir "Dasar-dasar Demografi" Hlm. 133-153. Depok: Penerbit Salemba Empat dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Purnomo, 2009. Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri. *JEP Volume 10 No. 1, Juni 2009*.
- Oishi, N. 2002. *Gender and Migration: An Integrative Approach, Working Paper No. 49 March, 2002*.
- Sudantoko, Joko, 2010. *Strategi pemberdayaan usaha batik skala kecil, Disertasi: Undip Semarang (Unpublish)*.
- Susilowati, (2002). "Analisis partisipasi wanita dan istri nelayan dalam membangun komunitasnya (Studi kasus pada perkampungan nelayan di Kecamatan Wedung, Demak, Jawa Tengah)". *Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XIV, No.1 Juni*.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2009. Mobility and Human Development in Indonesia: Human Development Research Paper 2009/19 June 2009. UNDP (diakses dari <http://demografi.bps.go.id/>, 18 April 2014)